

# **PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

## ***SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR***

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **I.1. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai Posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, Arus Kas, hasil opname kas, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai Alokasi Sumber Daya.

Secara spesifik, tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## **I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang - Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang - Undang No, 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi NTT No.9 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Gubernur No 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
10. Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
11. Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2014 tentang Bagan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi NTT.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan SKPD**

#### **Bab. I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

#### **Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD**

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab. III Penjelasan pos – pos laporan keuangan SKPD**

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
  - 3.1.1 Pendapatan- LRA
    - 3.1.2 Beban- LRA
    - 3.1.3 Belanja
    - 3.1.4 Aset
    - 3.1.5 Kewajiban
    - 3.1.6 Ekitas Dana
- 3.2 Pengungkapan atas pos – pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

## **Bab. IV Penjelasan Atas Informasi –informasi Non Keuangan**

- 4.1. Profil Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 4.2. Penjelasan realisasi Pendapatan berkurang/bertambah
- 4.3. Tingkat penyerapan belanja langsung/belanja modal

## **V. Penutup**

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Dinas PU Prov.NTT

Anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp.298.499.470.900.00 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.287.854.487.706.00 atau 96.43% yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.265.540.131.240.00 atau sebesar 96.26% dan belanja tidak langsung sebesar Rp.22.314.356.466.00 atau sebesar 98.58%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp.364.161.982.223 atau sebesar 97.21% mengalami penurunan sebesar Rp.76.307.497.517.00. Seluruh Belanja Langsung di jabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **2.2. BELANJA LANGSUNG DIREALISASI SEBESAR Rp. 265.540.131.240.00 ATAU 96.26 % DARI RENCANA YANG DITETAPKAN SEBESAR Rp. 275.864.733.900.00**

2	2	1	Belanja Pegawai direalisasi sebesar Rp.8.612.905.852.00 atau 96.84% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.893.883.000.00
2	2	1 01	Honorarium Non PNS direalisir sebesar Rp.1.292.481.730.00 atau 86,46% dari target yang ditetapkan Rp.1.494.953.000.00
2	2	1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan direalisir sebesar Rp.860.381.730.00 atau 84,32% dari rencana yang ditetapkan Rp.1.020.353.000.00
2	2	1 01 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja, Layanan Pengadaan barang dan jasa direalisir sebesar Rp.90.900.000.00 atau 92,24% dari rencana yang ditetapkan Rp.98.550.000.00

- 2 2 1 01 03 Honorarium Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan direalisasikan sebesar Rp.73.200.000.00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.73.200.000.00
- 2 2 1 01 04 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan direalisasikan sebesar Rp.49.700.000.00 atau 96.50% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.51.500.000.00
- 2 2 1 01 06 Honorarium Honorarium petugas lapangan/pengawas direalisasikan sebesar Rp.185.300.000.00 atau 84.86% dari rencana yang ditetapkan Rp.218.350.000.00
- 2 2 1 01 08 Honorarium pejabat/tim pengelola Barang Daerah direalisasikan sebesar Rp.18.600.000.00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.18.600.000.00
- 2 2 1 01 09 Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi direalisasikan sebesar Rp.14.400.000,00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.14.400.000,00
- 2 2 1 02 Honorarium Non PNS direalisasikan sebesar Rp.5.600.000.00 atau 99.50% dari target yang ditetapkan Rp.5.568.480.000.00
- 2 2 1 02 01 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap irealisasikan sebesar Rp.4.052.060.000.00 atau 99.71% dari rencana yang ditetapkan Rp.4.063.680.000.00
- 2 2 1 02 02 Upah Kerja direalisasikan sebesar Rp.1.548.000.000.00 atau 98.93% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.564.800.000.00
- 2 2 1 03 Uang Lembur direalisasikan sebesar Rp.192.292.000.00 atau 89.65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.214.500.000.00
- 2 2 1 03 01 Uang Lembur Pegawai direalisasikan sebesar

Rp.192.292.000.00 atau 89.65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.214.500.000.00.

2 2 1 06 Belanja Pegawai BLUD direalisasi sebesar Rp.1.528.072.122.00 atau 98.21% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.555.950.000.00

2 2 1 06 01 Belanja Pegawai BLUD direalisasi sebesar Rp. 1.528.072.122.00 atau 98.21% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. Rp.1.555.950.000.00

**2.2.2.BELANJA BARANG DAN JASA DIREALISIR SEBESAR Rp.33.717.112.078 ATAU 93.60% DARI TARGET YANG DITETAPKAN Rp.36.021.209.200.00**

2 2 2 01 Belanja bahan pakai habis direalisasi sebesar Rp.341.959.580.00 atau 95.86 % dari rencana yang ditetapkan sebesarRp.356.743.000.00

2 2 1 01 01 Belanja alat tulis kantor direalisasi sebesar Rp. 217.779.780.00 atau 94.51 % dari rencana yang ditetapkan Rp. 230.431.000.00

2 2 2 02 Belanja alat listrik dan elektronik direalisasi sebesar Rp.14.879.800.00 atau 99.20% dari rencana yangditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.00

2 2 2 03 Belanja perangkat, meterai dan benda poslainnya direalisasi sebesar Rp.23.100.000.00 atau 91.99 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.25.112.000.00

2 2 2 01 05 Belanja bahan bakar minyak/Gas direalisasi sebesar Rp.41.000.000.00 atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.41.000.000.00

2 2 2 01 11 Belanja alat kesehatan habis pakai direalisasi sebesar Rp.45,200,000.00 atau 100,00 % dari rencana yang ditetapkan sebesar 45,200,000.00

2 2 2 02 Belanja Bahan/material direalisasi sebesar Rp.7.120.000.000.00 atau 64.61 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.11.020.000.00

- 2 2 2 02 08 Belanja Bahan/material praktek/perengkapan pelatihan direalisasi sebesar Rp.7.120.000.000.00 atau 64.61 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.11.020.000.00
- 2 2 2 03 Belanja Jasa Kantor direalisasi sebesar Rp.1.803.166.971.00 atau 83.98 % dari rencana yang ditetapkan Rp. 2.147.132.000.00
- 2 2 2 03 01 Belanja telepon direalisasi sebesar Rp.3.392.657.00 atau 80.78 % dari rencana yang ditetapkan Rp.4.200.000.00
- 2 2 2 03 02 Belanja air direalisasi sebesar Rp.3.340.000.00 atau 79.52% dari rencana yang ditetapkan Rp.4.200.000.00
- 2 2 2 03 03 Belanja listrik direalisasi sebesar Rp.318.731.484.00 atau 88.54% dari rencana yang ditetapkan Rp.360.000.000.00
- 2 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah direalisasi sebesar Rp.29.985.000.00 atau 99.95% dari rencana yang di tetapkan Rp. 30,000,000,00
- 2 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet direalisasi,Rp 455.187.230.00 atau 85.37 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.533.200.000.00
- 2 2 2 03 08 Belanja Sertifikasi direalisasi sebesar Rp.44.992.100.00 atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan Rp.45.000.000.00
- 2 2 2 03 12 Belanja Transportasi dan Akomodasi direalisasi sebesar Rp.209.800.000.00 atau 67.37% dari rencana yang ditetapkan Rp.311.400.000.00
- 2 2 2 03 14 Belanja Dekorasi direalisasi sebesar Rp.4.716.500.00 atau 42.04% dari rencana yang ditetapkan Rp.11.220.000.00
- 2 2 2 03 16 Belanja Publikasi direalisasi sebesar Rp.45.800.000.00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 45.800.000.00

2	2	2	03	25	Belanja jasa pembersihan direalisir sebesar Rp.265.045.000.00 atau 95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 279.000.000.00
2	2	2	03	27	Belanja jasa kalibrasi direalisir sebesar Rp.99.715.000.00 atau 99.72% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.00
2	2	2	03	29	Belanja jasa angkut beras direalisir sebesar Rp.60.000.000.00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000.00
2	2	2	03	30	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Moderator Direalisasi sebesar Rp.83.500.000.00 atau 45.34% dari rencana yang ditetapkan Rp.184.150.000.00
2	2	2	03	31	Belanja Jasa Pihak Ketiga direalisir sebesar Rp.178.962.000.00 atau 100 % dari rencana yang ditetapkan Rp. 178.962.000.00
2	2	2	04		Belanja Premi Asuransi direalisir sebesar Rp.143.677.980.00 atau 95.04% Dari rencana yang ditetapkan Rp.151.169.400.00
2	2	2	04	03	Belanja luran Jaminan Kesehatan direalisir sebesar Rp.121.761.000.00 atau 99.98% dari rencana yang ditetapkan Rp.121.910.400.00
2	2	2	04	04	Belanja luran Ketenagakerjaan direalisir sebesar Rp.21.916.980.00 atau 74.91% dari rencana yang di tetapkan Rp.29.259.000.00
	2	2	05		Belanja perawatan kendaraan bermotor direalisir sebesar Rp. 216.886.426.00 atau 99.95% dari rencana yang ditetapkan Rp.217.000.000.00
2	2	2	0	01	Belanja Jasa Service direalisir sebesar Rp.49.999.500.00 atau 100 % dari rencana yang ditetapkan Rp.50.000.000,00
2	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang direalisir sebesar Rp.49.894.770.00 atau 99.79% dari rencana yang ditetapkan Rp.50.000.000.00

- 2 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas direalisasikan sebesar Rp.99.992.156 atau 99,99 % dari rencana yang ditetapkan Rp.100.000.000,00
- 2 2 2 05 07 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor direalisasikan sebesar Rp.17.000.000.00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan Sebesar Rp.17.000.000,00
- 2 2 05 Belanja Cetak dan Penggandaan direalisasikan sebesar Rp.189.281.600.00 atau 71.78% dari rencana yang ditetapkan Rp.263.700.000.00
- 2 2 2 06 01 Belanja Cetak direalisasikan sebesar Rp.16.965.500.00 atau 49.46% Dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.34.300.000.00
- 2 2 2 06 02 Belanja Penggandaan direalisasikan sebesar Rp.130.740.350.00 atau 70.80% dari rencana yang ditetapkan Rp.184.650.000.00
- 2 2 2 06 03 Belanja Jilid direalisasikan sebesar Rp.41.575.750.00 atau 92.91% Dari rencana yang ditetapkan Rp.44.750.000.00
- 2 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir direalisasikan Sebesar Rp. 16.500.000.00 atau 36.07% dari rencana yang ditetapkan Rp.45.750.000.00
- 2 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruangan / Pertemuan direalisasikan sebesar Rp.16.500.000.00 atau 36.07% dari rencana yang ditetapkan Rp. 45.750.000.00
- 2 2 2 8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas direalisasikan sebesar Rp. 145.300.000.00 atau 69.34% dari rencana yang ditetapkan Rp.209.558.000.00
- 2 2 2 08 01 Belanja Sarana Mobilitas Darat direalisasikan sebesar Rp. 145.300.000.00 atau 69.34% dari rencana yang ditetapkan Rp. 209.558.000.00
- 2 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman direalisasikan sebesar Rp.183.282.260. atau 65.10% dari rencana yang ditetapkan Rp.281.520.000.00

- 2 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat direalisasi sebesar Rp.32.512.800 atau 94.38% dari rencana yang ditetapkan Rp.34.450.000.00
- 2 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu direalisasi sebesar Rp.24.869.300.00 atau 99,48% dari rencana yang ditetapkan Rp.25.000.000,00
- 2 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan direalisasi sebesar Rp.125.900.160.00 atau 56.69% dari rencana yang ditetapkan Rp.222.070.000.00
- 2 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja direalisasi sebesar Rp.268.140.000.00 atau 99.85% dari rencana yang ditetapkan Rp.268.550.000.00
- 2 2 2 13 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan direalisasi sebesar Rp.268.140.000.00 atau 99.85% dari rencana yang ditetapkan Rp.268.550.000.00
- 2 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas direalisasi sebesar Rp.4.660.745.319.00 atau 85.55 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.448.145.100.00
- 2 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah direalisasi sebesar Rp.2.439.346.781.00 atau 86.79% dari rencana yang ditetapkan Rp.2.810.742.900.00
- 2 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah direalisasi sebesar Rp.2.221.398.538.00 atau 84.23% dari rencana yang ditetapkan Rp.2.637.402.200.00
- 2 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Direalisasi sebesar Rp.118.764.973.00 atau 98.36% dari rencana Yang ditetapkan Rp.120.750.000.00

- 2 2 2 17 01 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Direalisasi sebesar Rp.118.764.973.00 atau 98.36% dari rencana Yang ditetapkan Rp.120.750.000.00
- 2 2 2 20 Belanja Pemeliharaan direalisasi sebesar Rp.5.887.602.144.00 atau 98.43% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.981.500.000.00
- 2 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direalisasi sebesar Rp.153.754.600.00 atau 99,84% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.154.000.000.00
- 2 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan direalisasi sebesar Rp.5.484.805.744.00 atau 98.34% dari rencana yang ditetapkan Rp.5.577.500.000.00
- 2 2 2 20 05 Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direalisasi sebesar Rp.249.041.800.00 atau 99.62% dari rencana yang ditetapkan Rp.250.000.000.00
- 2 2 2 21 Belanja Jasa Konsultasi direalisasi sebesar Rp.17.206.314.950.00 atau 98.03% dari rencana yang ditetapkan Rp.17.551.826.020.00
- 2 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan direalisasi sebesar Rp.17.078.814.950.00 atau 98.02% dari rencana yang ditetapkan Rp.17.424.326.020.00
- 2 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultasi Pemetaan direalisasi sebesar Rp.127.500.000.00 atau 100% dari rencana yang ditetapkan Rp.127.500.00
- 2 2 2 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD direalisasi sebesar Rp.2.528.369.875.00 atau 85.22% dari rencana yang ditetapkan Rp.2.966.845.680.00

2 2 2 27 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD direalisasi sebesar Rp.2.528.369.875.00 atau 85.22 % dari rencana yang ditetapkan Rp.2.966.845.680.00

**2.2.3. BELANJA MODAL direalisasi sebesar Rp.223.210.113.310.00  
Atau 96.65 % dari rencana yang ditetapkan  
Rp.230.949.641.700.00**

2 3 3 Belanja Modal

2 2 3 04 Belanja modal pengadaan ala-alat angkutan motor direalisasi sebesar Rp.82.305.500.00 atau 91.45% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.90.000.000.00

2 2 3 04 12 Belanja modal pengadaan ala-alat angkutan darat bermotor sepeda motor direalisasi sebesar Rp.82.305.500.00 atau 91.45% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.90.000.000.00

2 2 3 12 Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor direalisasi sebesar Rp.78.936.000.00 atau 96.74% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.81.600.000.00

2 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan almari/rak arsip/rak buku direalisasi sebesar Rp.43.686.000.00 atau 99.06% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.44.100.000.00

2 2 3 12 16 Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput direalisasi sebesar Rp.32.250.000.00 atau 94.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.37.500.000.00

- 2 3 3 13 Belanja Modal pengadaan komputer direalisasi sebesar Rp.263.382.000.00 atau 98.83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.266.500.000.00
- 2 2 3 13 02 Belanja modal pengadaan personal computer/AIQ direalisasi sebesar Rp.160.725.000.00 atau 99.71% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.161.200.000.00
- 2 2 3 13 04 Belanja modal pengadaan printer direalisasi sebesar Rp.30.717.000.00 atau 93.65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.32.800.000.00
- 2 2 3 13 05 Belanja modal pengadaan scanner direalisasi sebesar Rp.22.440.00.00 atau 99.73% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.22.500.000.00
- 2 2 3 13 11 Belanja modal pengadaan software aplikasi direalisasi sebesar Rp.49.500.000.00 atau 99.00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.00
- 2 2 3 14 Belanja modal pengadaan mebeuleir direalisasi sebesar Rp.54.502.500.00 atau 96.55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.56.450.000.00
- 2 2 3 14 01 Belanja modal pengadaan meja kerja direalisasi sebesar Rp.31.947.500.00 atau 96.52% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.33.100.000.00
- 2 2 3 14 04 Belanja modal pengadaan meja kerja direalisasi sebesar Rp.22.555.000.00 atau 96.60% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.23.350.000.00

- 2 3 3 17 Belanja Modal pengadaan alat-alat studio direalisasikan sebesar Rp.208.907.500.00 atau 97.80% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.213.600.000.00
- 2 2 3 17 01 Belanja modal pengadaan kamera direalisasikan sebesar Rp.199.157.500.00 atau 98.11% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.203.000.000.00
- 2 2 3 17 03 Belanja modal pengadaan LCD/proyektor direalisasikan sebesar Rp.9.750.000.00 atau 91.98% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.10.600.000.00
- 2 2 3 23 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan direalisasikan sebesar Rp.161.957.463.170.00 atau 99.32% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.163.073.379.900.00
- 2 2 3 23 01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan direalisasikan sebesar Rp.161.957.463.170.00 atau 99.32% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.163.073.379.900.00
- 2 2 3 24 Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan direalisasikan sebesar Rp.14.481.856.250.00 atau 97.65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.14.829.622.950.00
- 2 2 3 24 04 Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan air diatas air direalisasikan sebesar Rp.14.481.856.250.00 atau 97.65% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.14.829.622.950.00
- 2 2 3 25 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air direalisasikan sebesar Rp.44.621.868.140.00 atau 87.76% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.50.845.188.850.00

- 2 3 3 25 05 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi direalisasikan sebesar Rp.41.461.630.820.00 atau 87.76% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.47.513.608.050.00
- 2 2 3 25 06 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum direalisasikan sebesar Rp.1.048.300.000.00 atau 86.20% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.216.100.000.00
- 2 2 3 25 11 Belanja modal pengadaan konstruksi talud / bronjong direalisasikan sebesar Rp.2.111.937.320.00 atau 99.83% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.115.480.800.00
- 2 2 3 28 Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan direalisasikan sebesar Rp.1.422.656.000.00 atau 97.78% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.454.950.000.00
- 2 2 3 28 01 Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor direalisasikan sebesar Rp.779.863.000.00 atau 97.71% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.798.100.000.00
- 2 2 3 28 04 Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung gudang direalisasikan sebesar Rp.642.793.000.00 atau 97.86% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.656.850.000.00
- 2 2 3 37 Belanja modal BLUD direalisasikan sebesar Rp.38.236.250.00 atau 99.70% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.38.350.000.00
- 2 2 3 37 01 Belanja modal BLUD direalisasikan sebesar Rp.38.236.250.00 atau 99.70% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.38.350.000.00

## **2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Dalam pencapaian target penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat hambatan /kendala antara lain :

1. Proses ganti uang (GU) yang terlambat setiap bulannya
2. Proses penarikan termin (LS belanja modal dan belanja barang/jasa) yang terlambat setiap bulan( bahkan tidak dilakukan menunggu progres 100% baru dilakukan pencairan)

## BAB III

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

##### 3.1.1 Pendapatan–LRA

Target penerimaan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur bersumber dari retribusi jasa usaha dan retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebesar Rp.500.000.00( lima ratus juta ) realisasi akhir tahun sebesar Rp.866.929.828.00 atau 173.39 % mengalami kenaikan dari target yang di tetapkan jika di dibandingkan dengan tahun anggaran 2017.

##### 3.1.2 Belanja

Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai perubahan APBD Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.298.499.470.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.287.854.487.706.00 atau 96.43 % yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

###### a. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Belanja operasi terealisasi sebesar Rp.64.644.374.396.00 atau 95,70% dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp. 67.549.829.200.00

- ✓ Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.30.927.262.318.00 atau 98.09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.31.528.620.000.00
- ✓ Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.33.717.112.078.00 atau 93.60 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.36.021.209.200.00
- ✓ Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.223.210.113.310.00 atau 96.65 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.230.949.641.700.00
  - ✓ Tanah,tidak mengalami penambahan dalam tahun berjalan
  - ✓ Belanja Modal peralatan dan mesin, terealisasi sebesar Rp.688.033.500 atau 97.06 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.708.150.000.00
  - ✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan, terealisasi sebesar Rp.1.422.656.000.00 atau 97.78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.454.950.000.00

- ✓ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, terealisasi sebesar Rp.221.061.187.560.00 atau 96.64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 228.748.191.700.00
- ✓ Belanja Aset tetap lainnya ( Belanja Blud ) merupakan belanja operasional yang tidak menjadi aset

### 3.2.1 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO/ Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari :

1. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp. 866.929.828.00 atau 173.39% berasal dari :
  - Sewa Alat Berat direalisasi sebesar Rp.102.253.000.00
  - Sewa Pengujian / Jasa Laboratorium direalisasi sebesar Rp.764.676.828.00

Pendapatan tersebut diatas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 49 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 dimana sesuai Peraturan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga merupakan Dinas yang berkewajiban memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi jasa usaha yaitu : **Sewa Alat Berat dan Sewa Pengujian / Jasa Laboratorium.**

2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang merupakan hasil kerja sama BLUD – SPAM terealisasi sebesar Rp.3.617.842.518.00 atau 96.48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.750.000.000

### 3.2.2 Beban LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang benar-benar telah dimanfaatkan dalam rangka menunjang

kegiatan operasional selama 1(satu ) tahun anggaran. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Beban Pegawai** merupakan, beban pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.24.034.720.588.00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.24.034.720.588.00

## 2. **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa merupakan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari transaksi dalam periode pelaporan yang berdampak pada pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang meliputi beban persediaan alat kantor, beban persediaan bahan/material, beban jasa kantor, beban premi asuransi, beban perawatan kendaraan bermotor, beban cetak dan penggandaan, beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir/bebab sewa sarana mobilitas, beban makanan dan minuman, beban belanja pakaian kerja, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan, beban jasa konsultasi, dan neban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 yang mana telah terealisasi sebesar Rp.40.602.767.808.00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.40.602.767.808.00

## 3. **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan adalah Pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aktiva. Nilai penyusutan aset tetap periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp.208.919.828.936.07

## 4. **Surplus / Defisit LO**

Surplus /Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan Beban, selama 1 tahun periode pelaporan. setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dengan pos luar biasa. surplus defisit laporan operasional 31 Desember 2018 sebesar (Rp.269.072.544.986.07)

### 3.3. Pos – Pos Neraca

Pos – pos Neraca Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disajikan menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Tahun 2018 terdiri dari Neraca awal 1 Januari 2018 sebagai hasil dari Restatement akibat dari kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Neraca per 31 Desember 2018.

#### 1. Aset Lancar

Saldo Kas BLUD - SPAM, per 31 Desember 2018 adalah Rp. 341.193.993.00 jumlah tersebut merupakan selisih pendapatan dan belanja BLUD – SPAM

#### 2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Neraca per 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp.2.673.805.753.848.11 sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.708.183.980.222.04 terjadi penambahan sebesar Rp. 34.378.226.373.93 dengan rincian sebagai berikut :

##### ✓ Aset Tetap Tanah

Aset tanah per 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 312,282,258,168.48 dan keadaan per 31 desember 2018 sebesar Rp.312,282,258,168,48 tidak ada penambahan aset tetap Tanah pada Tahun anggaran 2018.

##### ✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 17,152,711,056,34 sedangkan per 31 desember 2018 sebesar Rp. 15,080,841,043,79 ada pengurangan sebesar Rp.2,071,870,013,24 dengan rincian sebagai berikut :

No		
1	Saldo Awal 2018	Rp 17,152,711,056,34
2	Belanja Modal 2018	Rp 674,370,250,00
3	Koreksi Bertambah	Rp 0
4	Beban Penyusutan	<u>Rp 2,746,240,263,24</u>
		Rp 15,080,841,043,10

✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 131,724,299,840.80 sedangkan per 31 desember 2018 sebesar Rp.130,351,122,391,20 ada pengurangan sebesar Rp.1,191,162,449,60 dengan rincian sebagai berikut :

No			
1	Nilai Buku	Rp	131,724,299,840,80
2	Belanja Modal 2018	Rp	1,422,656,000,00
3	Nilai Perolehan akumulasi Penyusutan	Rp	(182,025,000,00)
4	Koreksi berkurang akumulasi Penyusutan	Rp	(182,025,000,00)
5	Beban Penyusutan	<u>Rp</u>	<u>(2,746,240,263,24)</u>
		Rp	130,351,112,391,20

✓ Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Jalan,Irigasi dan Jaringan per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 2,194,264,167,387.49 sedangkan per 31 desember 2018 sebesar Rp. 2,194,264,167,387.49 ada Penambahan sebesar Rp.46,786,702,499,77 dengan rincian sebagai berikut :

No			
1	Nilai Buku	Rp	2,194,264,167,387,49
2	Belanja Modal 2018	Rp	218,953,991,578,00
3	Hibah	Rp	19,983,626,000,00
4	Mutasi Bertambah	Rp	11,073,014,145,00
5	Beban Penyusutan	Rp	203,223,929,223,23
6	Koreksi Berkurang Nilai Perolehan	Rp	487,160,855,591,51
7	Koreksi Berkurang Ak.Penyusutan	<u>Rp</u>	<u>(487,160,855,591,51)</u>
		Rp	2,241,050,869,887,26

Terdapat koreksi bertambah senilai Rp.2,109,595,482,00 yang mana pengakuan sebagai aset tetap akan terjadi di akhir Ta.2019 setelah fisik dinyatakan seratus persen yang dibuktikan dengan berita acara serah terima pertama.

✓ Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2018 adalah Rp. 33,095,800 dan Saldo Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 33,095,800,00 sebagai berikut :

No			
1	Saldo Awal 2018	Rp	33,095,800,00
2	Belanja Modal 2018	Rp	
3	Koreksi Berkurang	Rp	0
4	Beban Penyusutan	Rp	0
		Rp	33,095,800,00

✓ Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 12,478,586,171.00 sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.9,385,802,932,00 ada pengurangan sebesar Rp.3,092,783,239,00 dengan rincian sebagai berikut :

No			
1	Saldo Awal 2018	Rp	18,349,221,595,00
2	Belanja Modal 2018	Rp	2,109,595,482,00
3	Koreksi Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(11,073,014,145,00)</u>
	Saldo tahun 2018	Rp	9,385,802,932,00

✓ Aset Lainnya

a. Aset tetap tak berwujud sebesar Rp. 857,104,000,00 dengan amortisasi (296,622,000,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Awal 2018 sebesar Rp.807,604,000,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 49,500,000,00
3. Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya sebesar Rp.(296,622,000)

b. Aset rusak berat sebesar Rp.9,074,855,732,97 akumulasi penyusutan aset rusak berat Rp. (9,057,858,731,42).

### 3.4. Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah dikurangi dengan kewajiban. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas awal sebesar Rp.2,675,298,692,571,66

RK PPKD	Rp. 282,892,879,631,00
Surplus/deficit LO sebesar	Rp.( 269,072,544,986,07)
Dampak komulatif perubahan kebijakan/ Kesalahan mendasar	Rp. 0
Dampak perubahan aset tetap	Rp. (467,359,254,591,51)
Dampak perubahan atas beban	Rp. 0
Dampak perubahan penyusutan	<u>Rp. 487,342,880,591,51</u>
Ekuitas Akhir	Rp. 2,709,102,653,216,59

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **1.1. Profil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sejalan dengan Peraturan Daerah yang telah mengalami perubahan Nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap masih menggunakan rencana strategi untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun dengan visi dan misi yang masih melekat dengan tugas dan tanggungjawab bidang infrastruktur antara lain :

**Visi :** “ Tersedianya infrastruktur Pekerjaan Umum berbasis Penataan Ruang yang andal dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman, agar terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis”

**Misi :**

1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air (SDA), dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi SDA, pendayaagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
2. Mewujudkan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
3. Mengembangkan permukiman yang berkualitas dan produktif.
4. Melaksanakan pembinaan pembangunan bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan
5. Meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni.
6. Melakukan penataan ruang wilayah provinsi yang aman,nyaman,produktif dan berkelanjutan.
7. Memperdayakan masyarakat dalam pembangunan bidang pekerjaan umum.
8. Menciptakan iklim usaha jasa konstruktif yang kondusif dan kompetitif.
9. Meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruktif yang professional dan memadai
10. Mengoptimalkan peranan lembaga lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah dalam meningkatkan kualitas dankuantitas penyedia jasa.
11. Melakukan penyusunan program,evaluasi dan pengendalian yang berorientasi pada prioritas dan keseimbangan wilayah.
12. Meningkatkan keandalan bangunan melalui uji mutu dengan memanfaatkan teknologi sesuai norma,standar,pedoman dan manual.
13. Meningkatkan pengelolaan peralatan dan perbengkelan.
14. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Sumber daya Manusia aparatur
15. Melakukan tindakan perbaikan infrastruktur dalam rangka tanggap darurat bencana.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang telah membagi habis tugas dan fungsinya kedalam 1 (satu) unit kerja Sekertariat,5 ( lima ) Bidang, dan 1 ( satu ) BLUD - SPAM.

#### **4.2. Penjelasan realisasi Pendapatan berkurang/bertambah**

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluruh aset tetap yang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dilakukan perhitungan penyusutan. Selain perhitungan penyusutan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menghitung nilai batasan kapitalisasi yaitu aset yang nilai perolehannya dibawah Rp. 500.000 dialihkan pencatatannya dari aset tetap menjadi ekstrakuntabel serta aset yang rusak berat dialihkan dari aset tetap menjadi aset lain – lain yang selanjutnya di proses penghapusan.

Pada tahun anggaran 2018 pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan/ bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penambahan tersebut bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Saldo kas per 31 desember 2018 di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 341.193.993.00 (Tunai + Bank ) yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang dikelola oleh BLUD- SPAM.

4.3 Tingkat penyerapan belanja langsung/belanja modal pada tahun 2017 cukup mengalami kenaikan sekalipun jumlah anggaran yang di dapat mengalami penurunan dari tahun ke tahun di bandingkan dengan jumlah kebutuhan infrastruktur pada 22 kabupaten dan 1 Kota. Untuk mencapai target masih terdapat kendala yang menjadi penghambat terserapnya keuangan. Faktor tersebut antara lain:

1. Penetapan Paket pemenang sangat terlambat
2. Penarikan rutin sesuai dengan schedull untuk belanja langsung/LS pihak ke 3 masih belum optimal

3. Pengajuan ganti uang /GU sangat terlambat sebagai akibat dari pertanggung jawaban yang selalu tertunda khusus pada pembayaran honor panitia dan perjalanan dinas

#### 4. Sosial Budaya

- adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap alam masih tinggi contohnya pada saat musim tanam masyarakat cenderung berkonsentrasi pada pekerjaan pokok sehingga mengurangi tenaga kerja yang diserap untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- adanya pemindahan lokasi karena terdapat masalah pembebasan lahan.
- Adanya pergeseran lokasi dikarenakan prioritas penanganan
- Adanya kondisi topografi lokasi yang baru (berbatuan) sehingga proses pelaksanaan pekerjaan berjalan lambat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran ( PA ) atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua stakeholder dan Tuhan memberkati.

Kupang, 31 Desember 2018

Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Dan Penataan  
Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Ir.Andreas W.Koreh, MT**  
Pembina Utama Madya  
Nip.19640408 199003 1 012

1. Saldo awal 2018	Rp. 17,152,711,056,34
2. Belanja Modal Ta.2018 Ta. 2018	Rp. 674,370,250,00
3. Koreksi bertambah	Rp. 0
4. Beban Penyusutan Saldo tahun 2018	Rp. <u>2,746.240.263,24</u>
	Rp.15,080,841,043,79